

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Area 2
Deregulasi Kebijakan



Rencana Aksi



Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi



Deregulasi Aturan yang Menghambat Birokrasi



Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan

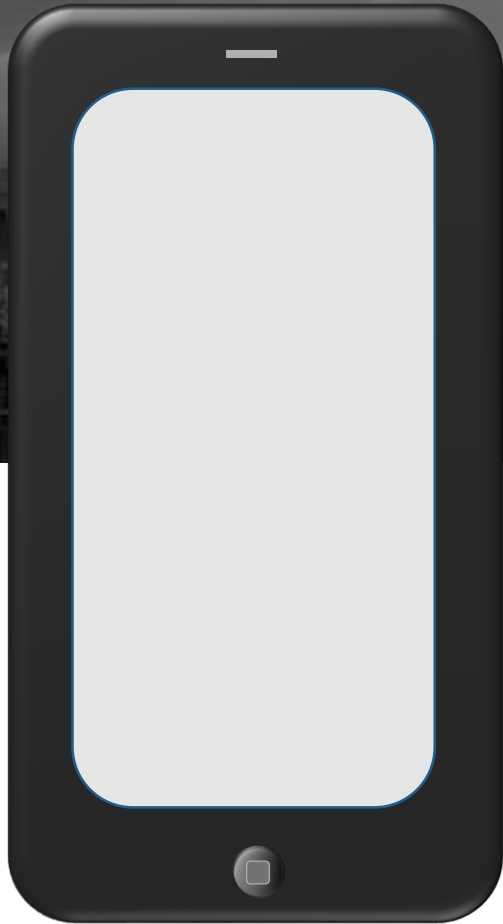


Penguatan Sistem Regulasi Nasional



CAPAIAN

Identifikasi dan Pemetaan Regulasi



Telah disusun
identifikasi
Persekjen yang
tidak sinkron



Telah disusun
peta keterkaitan
Persekjen yang
telah ditetapkan
dengan peraturan
perundang-
undangan terkait.

Tindak lanjut terhadap Peraturan yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan terkait



Persekjen tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Perskejen tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Persekjen tentang Inpassing Perisalah

Persekjen tentang Inpassing Asisten Perisalah

Telah dilakukan perubahan / penggantian terhadap peraturan yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan

Tindak lanjut terhadap Peraturan yang menghambat birokrasi



Telah dilakukan evaluasi terhadap Persekjen Tata Naskah Dinas

Berdasarkan hasil evaluasi Persekjen tentang Tata Naskah Dinas telah ditetapkan Persekjen sebagai berikut:

- ❖ Persekjen tentang Tata Naskah Dinas
- ❖ Persekjen tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Sebelum:

Penomoran Produk Hukum menyebar di masing-masing unit.

Penandatanganan dan penyampaian naskah dinas dilakukan dengan manual.

Sesudah:

Penomoran Produk Hukum terpusat.

Penandatanganan dan penyampaian naskah dinas dapat dilakukan dengan digital.

DEREGULASI ATURAN

Regulasi dalam penanggulangan COVID

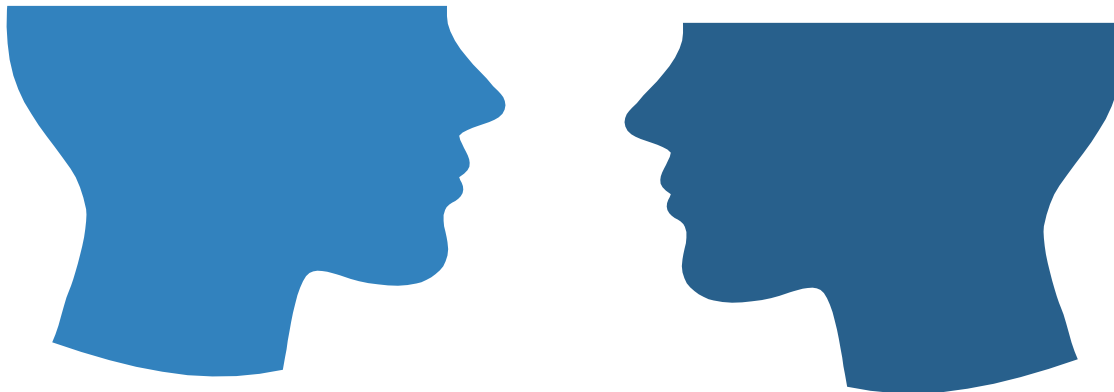
Persekjen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Keadaan Darurat

Integrasi Pengaduan Masyarakat Satu Pintu terhadap Kinerja Setjen DPR RI

Persekjen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Payung hukum penggunaan sistem elektronik dalam penandatanganan dan penyampaian naskah dinas

Persekjen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan

Telah diselesaikan 14 Persekjen pada tahun 2020 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1962/SEKJEN/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Prioritas Tahun 2020.




SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

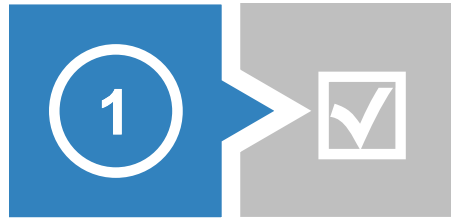
NOMOR : 140/SEKJEN/2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PRIORITAS TAHUN 2021

Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 140/SEKJEN/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Prioritas Tahun 2021 sebagai agenda setting untuk tahun 2021.

INOVASI



Dasar Hukum
Persekjen Nomor 20 Tahun 2017



Kondisi “Before”
Penyampaian draft dilakukan secara paper based.

Portal Setjen DPR RI

Edy Susilo
user
Edit My Profile

Daftar Aplikasi (18)

- absensi (viewer)
- disiplin (guest)
- dokoe (user)
- elearning (user)
- jdih (user)
- keuangan (guest)
- koperasi (viewer)
- korpri (guest)
- minimarket (user)
- perjadin (user)
- portal (user)
- ppkp (guest)
- pusdiklat (user)
- siap (guest)
- sidiklat (guest)
- sirajin1 (user)
- sniper (user)
- tim (guest)

Daftar Usulan Peraturan Sekjen

Pengusul	Tanggal	Tentang
BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT UTAMA	10 Feb 2021	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2010/ tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	10 Feb 2021	Peraturan Sekjen Tentang Pendampingan Sekretariat Dalam Kunjungan Kerja Anggota Dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Kondisi “After”
Pengusulan rancangan Persekjen dilakukan web based.
Pembahasan dapat dilakukan real time dengan Unit Terkait melalui Drive.



Rencana Pengembangan
Sedang dikembangkan aplikasi E-Legalitas. Sistem pengendalian draft Persekjen dilakukan dalam satu aplikasi terintegrasi. Unit pengusul dapat melihat perkembangan pembahasan draft Persekjen.



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TERIMA KASIH

